



**SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 LKJIP

“Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah. Seluruh sasaran dan indikator kinerja yang dilaporkan dalam LKJIP ini telah diselaraskan dan konsisten dengan dokumen perencanaan strategis.”

Disiapkan Oleh :
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



**Komplek Perkantoran Bukit Menderang
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kel. Rano**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2025, serta sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui LKjIP ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Muara Sabak, 21 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Sumber Daya Aparatur	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Kinerja Utama Perangkat Daerah	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	11
2.3 Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU.....	12
2.4 Rencana Aksi.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1 Capaian Kinerja	45
3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	45
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir ...	47
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	47
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada).....	49
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	51
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	54
3.2 Realisasi Anggaran.....	59

BAB IV PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Langkah Perbaikan	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja	11
Tabel 2.3 Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU	12
Tabel 2.4 Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2025	28
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	45
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	47
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	47
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional.....	50
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi	51
Tabel 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	54
Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematik untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 adalah memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggungjawab antar Bagian, memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan profesional dalam pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh Bagian, dan memberikan contoh kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Menjadi acuan utama dalam penyusunan kegiatan Bagian;
- d. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai akumulasi dan kinerja Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.3 Dasar Hukum

1. Idiil : Pancasila
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2025);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025;
- m. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
- n. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025;

1.4 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan adanya momentum otonomi daerah serta semangat reformasi, yang secara tidak langsung membawa pengaruh dalam penataan pemerintah pada umumnya dan penataan organisasi perangkat daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan sumber daya aparatur yang penjabarannya dituangkan kedalam bentuk Peraturan Pemerintah.

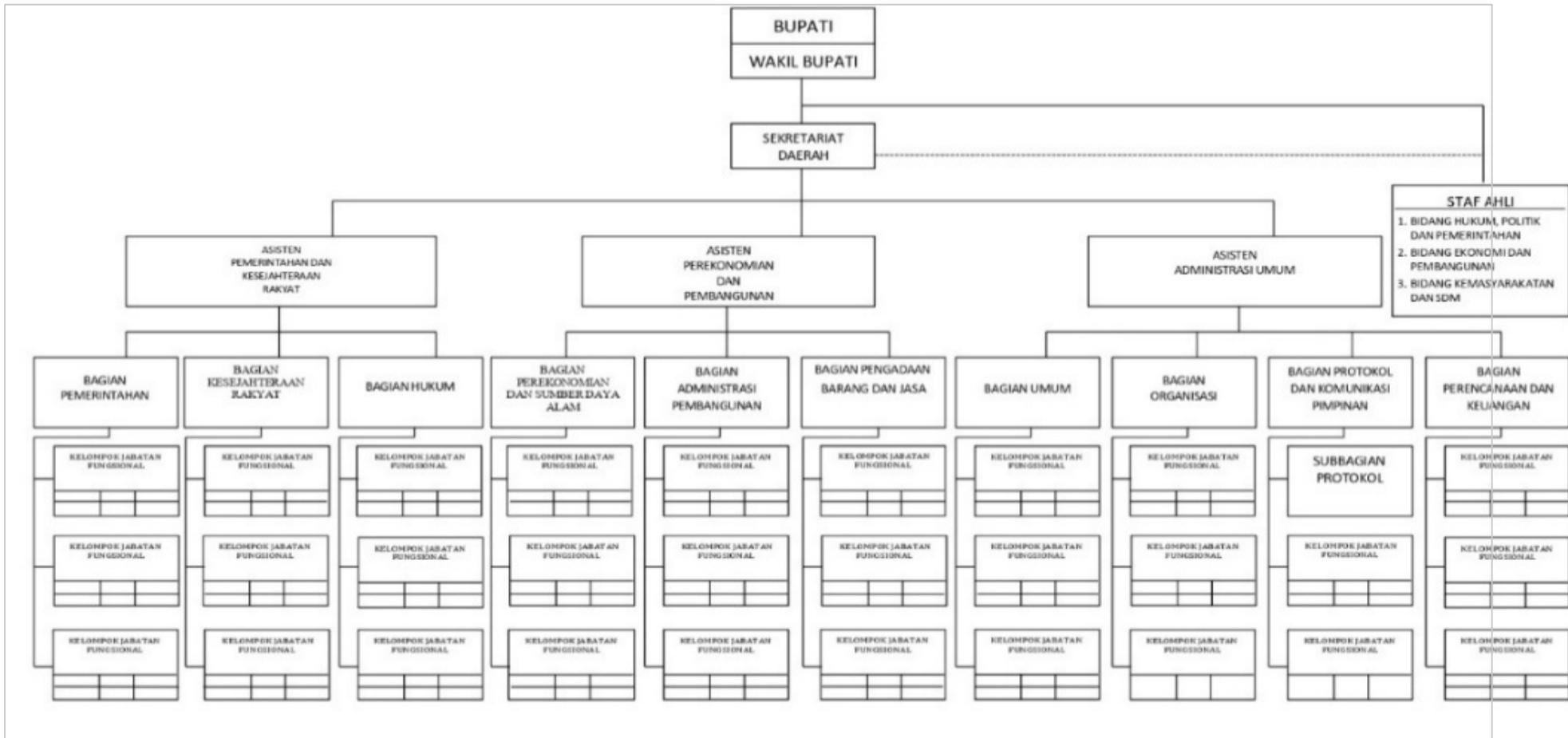
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
 3. Bagian Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Protokol; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- d. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

Untuk lebih jelas Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur



1.5 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan aset utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi, selain metode anggaran dan saraa/prasarana. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia, karena manusia sebagai sumber daya aparatur merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik dan tinggi dari aparatur. Suatu organisasi akan menjalani kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya begitu pula halnya dengan peningkatan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dalam bidangnya.

Keadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan 31 Desember 2025 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 92 orang Pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dengan Jumlah 92 Orang

a) Dari segi ke pangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari :

- Golongan I : -
- Golongan II : 8
- Golongan III : 66
- Golongan IV : 18

b) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :

- S2 : 7 Orang
- S1 : 67 Orang
- D3 : 4
- SLMA : 12
- SLTP : 2
- SD : -

c) Dari segi Jabatan Struktur/Eselon adalah sebagai berikut :

- Eselon II : 7
- Eselon III : 10
- Eselon IV : 1
- Fungsional : 28

2. Tenaga Honorer dengan Jumlah 124 Orang

Dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| - Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran | : 70 Orang |
| - Tenaga Pelayanan Umum | : 21 Orang |
| - Tenaga Kebersihan | : 13 Orang |
| - Tenaga Keamanan | : 3 Orang |
| - Sopir | : 8 Orang |
| - Petugas Syara Masjid | : 9 Orang |
| 3. Staf Ahli Bupati berjumlah | : 3 Orang |

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan umum mengenai organisasi, meliputi profil, mandat, dan peran strategi yang diemban. Selain itu, diuraikan pula isu-isu strategis (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi sebagai konteks penting dalam memahami keseluruhan kinerja pelaksanaan.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dipaparkan ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Uraian mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Subbab ini menyajikan kinerja kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja organisasi. Analisis kinerja dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

1. Membandingkan target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan.
2. Melakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya dan tren beberapa tahun terakhir.
3. Menganalisis realisasi kinerja hingga tahun berjalan terhadap target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.
4. Membandingkan capaian tahun ini dengan standar nasional jika tersedia.
5. Mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja, termasuk alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Menganalisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.
7. Mengevaluasi program atau kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Subbab ini menguraikan penggunaan anggaran, baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan, untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Bab penutup memuat kesimpulan umum terkait pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan serta langkah-langkah strategi yang akan dicapai pada periode mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran

Lampiran laporan terdiri atas:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja.
2. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kinerja utama suatu perangkat daerah tercermin dari pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan mandatnya. Untuk mengukur pencapaian tersebut, diperlukan alat ukur yang terfokus pada hasil akhir (*outcome*) dari proses bisnis inti (*core business*) organisasi. Alat ukur tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi utama suatu instansi pemerintah. IKU dirumuskan dengan mempertimbangkan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (*SMART*). Penetapan IKU oleh pimpinan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja bagi setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi yang jelas serta terukur mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mewujudkan target strategisnya.

Berikut ini disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab dan fokus pencapaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber
1.	Nilai LPPD	Angka	Nilai hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Kementerian PAN dan RB
2.	Rata Rata Nilai SAKIP OPD	Angka	Jumlah nilai SAKIP seluruh OPD dibagi dengan jumlah OPD yang dievaluasi	Kementerian PAN dan RB
3.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan di daerah sesuai metodologi OJK	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4.	NILAI SAKIP OPD	Angka	Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat
5.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Nilai indeks reformasi hukum daerah berdasarkan penilaian dan metodologi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Daerah	Nilai LPPD	3,0	
		Rata - rata Nilai SAKIP OPD	65	
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,44	
		Nilai SAKIP OPD	73	
		Indeks Reformasi Hukum	87,05	
JUMLAH APBD PERUBAHAN TAHUN 2025		Rp	41.740.698.821	
yang terdiri dari :				
A. BELANJA OPERASI		Rp	36.894.113.421	
1	Belanja Pegawai	Rp	13.524.238.299	
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	23.089.875.122	
3	Belanja Hibah	Rp	280.000.000	
B. BELANJA MODAL		Rp	4.846.585.400	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	4.807.585.400	
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	24.000.000	
3	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	15.000.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 5.342.800	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 35.519.909.263	APBD
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 4.071.477.238	APBD
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 2.143.969.520	APBD

2.3 Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Sekretaris Daerah tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target 2025	Anggaran
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			Rp 5.342.800
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Percentase)	100%	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	3	Rp 5.342.800

	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp 35.519.909.263
Tercapainya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di setiap perangkat daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 161.204.200
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	2	

	Daerah (Berita Acara)		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang	3	

	disusun (Dokumen)		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 13.715.635.899
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12	

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	101	
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp 20.500.000
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 430.795.000
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	263	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 2.388.198.231
Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	

	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 5.213.885.400
Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	

	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 3.678.074.800
Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 5.014.618.724
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	6	

	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Rp 847.900.000
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	8	

	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	10	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	
4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			Rp 1.372.557.657
Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	40	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40	
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi			Rp 274.593.852
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	1	

	dan Tata Laksana (Laporan)		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Rp 2.401.945.500
Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	60	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	20	
	Jumlah Laporan Pendokumentasi n Tugas Pimpinan (Laporan)	130	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Rp 4.071.477.238
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan,	100%	

	Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Percentase)		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan			Rp 520.219.524
Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	43	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	86	
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Rp 2.881.754.350

Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	45	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4	
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	3	
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	4	

	Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	55	
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Rp 669.503.364
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	5	
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	450	
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	3	
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah			Rp -
Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	-	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	-	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	-	

4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Rp 2.143.969.520
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang Jasa (Persentase)	100%	
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			Rp 273.452.040
Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	-	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	1	

	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			Rp 581.904.778
Indeks Pengelolaan Program Pembangunan secara Kuantitatif maupun Kualitatif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	2	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	3	
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Rp 1.198.695.466
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	12	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	25	
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			Rp 89.917.236

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	

2.4 Rencana Aksi

Tabel 2.4 Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
					TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV					(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Setda)	90									PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	5.342.800
				Melaksanakan Rapat Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100%	Bagian Pemerintahan		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelaksanaan Kegiatan Rapat Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.342.800
									5 Dok		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.342.800

	Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan	persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang pemerintahan	1							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				35.519.909.263
				Melaksanakan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah					100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	161.204.200
										4 Dok		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.751.300
										80 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000
										1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	9.638.400
										1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12.000.000

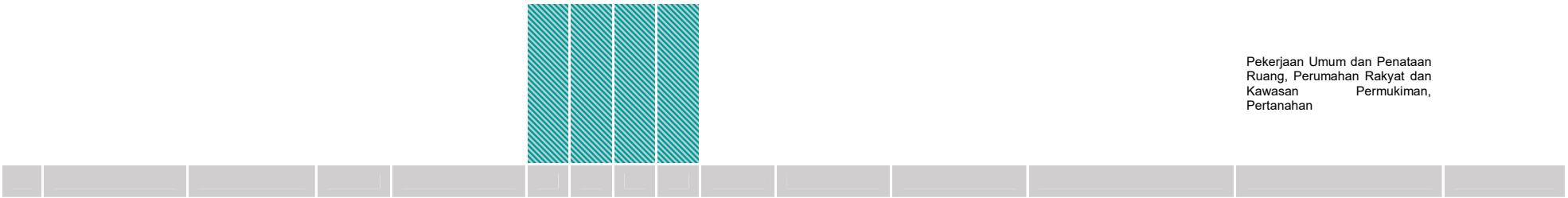
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		Administrasi Perangkat Daerah	Keuangan	Persentase Kegiatan	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.715.635.899
									12 Dok		Evaluasi Daerah	Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.007.700	
									12 Laporan							
									1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		17.456.800	
									####		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12.895.738.299	
									12 Dok		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		746.371.700	
									4 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.481.800	
									2 Dok		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2.725.700	

				Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	Bagian Umum		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.213.885.400
									1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.628.400.000
									6 Unit		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	567.034.400
									12 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.496.451.000
									2 Unit		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	522.000.000
				Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	Bagian Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.678.074.800
									12 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.019.350.000

				Melaksanakan Administrasi Tata Pemerintahan					100%	Bagian Pemerintahan			Administrasi Pemerintahan	Tata	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	520.219.524
									2 Dok				Penataan Pemerintahan	Administrasi	Jumlah Penataan Dokumen Administrasi	Dokumen Hasil Administrasi	233.328.483
									2 Dok				Pengelolaan Kewilayahan	Administrasi	Jumlah Pengelolaan Dokumen Administrasi	Dokumen Hasil Administrasi	135.429.990
									1 Dok				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		151.461.051
				Melaksanakan Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					100%	Bagian Kesra			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.881.754.350
									6 Dok				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen Hasil Bina Mental Spiritual	2.656.554.970

				Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100%	Bagian Pembangunan		Pelaksanaan Pembangunan Administrasi	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	581.904.778
								2 Dok		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		160.863.484
							1 Laporan		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		101.561.247	
							2 Laporan		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan		319.480.047	
				Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.198.695.466	
							100 Dok		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		647.151.743	
							100 Dok		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		347.569.148	
							4 Orang		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		203.974.575	

				Melaksanakan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				100%	Bagian Perekonomian dan SDA		Pemantauan Sumber Daya Alam	Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	89.917.236
											1 Dok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	25.851.248
										1 Dok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	24.003.844	
										1 Dok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,	40.062.144	



Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Pertanahan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai.

Bab ini menyajikan penjabaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama satu tahun anggaran, berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana target kinerja telah berhasil dicapai.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Analisis ini penting sebagai bahan evaluasi guna menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memahami bahwa akuntabilitas bukan hanya sebatas laporan administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh capaian kinerja, baik yang berhasil maupun yang belum tercapai, disampaikan secara terbuka dalam laporan ini sebagai wujud transparansi dan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui bab ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki maupun dipertahankan. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang dirumuskan ke depan dapat disusun secara lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan serta tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat ditentukan oleh bagaimana capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dilaksanakan dalam satu kurun waktu tertentu. Perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran dengan target perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi indikator utama dalam menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja yang diberikan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja disajikan menurut kelompok indikator utama dan capaian sasaran secara keseluruhan terhadap indikator utama dengan mencakup sasaran. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian kinerja tidak terlepas dari komitmen dari masing-masing Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran Kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja seperti berikut:

3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator sasaran		Target	Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Daerah	1	Nilai LPPD	3,0	-
	2	Rata Rata Nilai SAKIP OPD	65	-
	3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,44	-
	4	NILAI SAKIP OPD	73	-
	5	Indeks Reformasi Hukum	87,05	77,46

Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya Akuntabilitas Daerah

Dari kelima indikator tersebut, sebagian besar belum memiliki data realisasi pada tahun pelaporan, sementara satu indikator telah menunjukkan capaian kinerja yang dapat dievaluasi.

1. Nilai LPPD

Target yang ditetapkan sebesar 3,0, namun hingga akhir tahun 2025 belum tersedia data realisasi. Hal ini umumnya disebabkan oleh proses evaluasi LPPD yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya baru diumumkan pada tahun berikutnya.

2. Rata-rata Nilai SAKIP OPD

Target sebesar 60-70, namun realisasi belum dapat disajikan. Ketiadaan data ini dapat disebabkan oleh proses evaluasi SAKIP OPD yang masih berjalan.

3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Target IKAD ditetapkan sebesar 3,44, namun realisasi belum tersedia pada periode pelaporan. Indikator ini bergantung pada pengukuran dan publikasi dari lembaga terkait.

4. Nilai SAKIP OPD

Target yang ditetapkan sebesar 73, namun realisasi belum dilaporkan. Hal ini sejalan dengan mekanisme penilaian SAKIP yang hasilnya biasanya diterbitkan setelah proses evaluasi selesai.

5. Indeks Reformasi Hukum

Target indikator ini sebesar 87,05, dengan realisasi sebesar 77,46. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan, khususnya dalam penguatan regulasi, kualitas perencanaan produk hukum, serta efektivitas implementasi reformasi hukum di daerah.

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai LPPD	3,0	3,0	3,0	2,66 66	-	-	88,89	-	-
Rata Rata Nilai SAKIP OPD	60-70	60-70	60-70	62,10	62,38	-	100%	100%	-
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,10	3,25	3,44	3,14	3,36	-	101,29%	103,38%	-
NILAI SAKIP OPD	70-80	70-80	70-80	70,16	72,16	-	100%	100%	-
Indeks Reformasi Hukum	>70-80	>70-80	87,05	55,35	86,46	77,46	100%	100%	88,99

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai LPPD	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,55	2,7044	2,6666	-	-
2	Rata Rata Nilai SAKIP OPD	50-60	60-70	60-70	60-70	60-70	58,53	60,41	60,10	62,38	-
3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	NA	NA	3,25	3,44	3,44	NA	NA	3,14	3,36	-
4	NILAI SAKIP OPD	50-60	50-60	70-80	70-80	70-80	65,31	68,10	70,16	72,16	-
5	Indeks Reformasi Hukum	NA	NA	>70-80	>70-80	87,05	NA	NA	55,35	86,46	77,46

Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya Akuntabilitas Daerah

1. Nilai LPPD

Target Nilai LPPD dalam Renstra Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 3,0 secara konsisten pada periode 2021–2025. Realisasi capaian pada Tahun 2021 hingga 2023 masing-masing sebesar 2,55, 2,70, dan 2,67, yang menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun terdapat peningkatan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022, capaian Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pemenuhan beberapa indikator penilaian LPPD serta masih perlunya penguatan koordinasi dan kualitas data dukung dari perangkat daerah. Ke depan, peningkatan kualitas pelaporan dan pemantauan indikator LPPD akan terus dioptimalkan.

2. Rata-rata Nilai SAKIP OPD

Target Rata-rata Nilai SAKIP OPD mengalami peningkatan dari rentang 50–60 pada Tahun 2021 menjadi 60–70 pada Tahun 2022–2025. Realisasi capaian menunjukkan tren positif, yaitu 58,53 pada Tahun 2021, meningkat menjadi 60,41 pada Tahun 2022, 60,10 pada Tahun 2023, dan 62,38 pada Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja OPD telah memenuhi target minimal Renstra sejak Tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh peningkatan pemahaman OPD terhadap implementasi SAKIP serta adanya pendampingan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah mulai ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2023 dengan target 3,25, meningkat menjadi 3,44 pada Tahun 2024 dan 2025. Realisasi capaian pada Tahun 2023 sebesar 3,14, yang menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai. Namun, pada Tahun 2024 realisasi meningkat menjadi 3,36, yang berarti telah melampaui target. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program dan kebijakan dalam mendorong inklusi keuangan daerah. Upaya peningkatan literasi dan akses layanan keuangan akan terus dilanjutkan untuk menjaga konsistensi capaian.

4. Nilai SAKIP OPD

Target Nilai SAKIP OPD pada tahun 2021 dan 2022 berada pada rentang 50–60, kemudian meningkat menjadi 70–80 pada tahun 2023 hingga 2025. Realisasi capaian menunjukkan nilai 65,31 pada tahun 2021, meningkat menjadi 68,10 pada tahun 2022, kemudian mencapai 70,16 pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 72,16 pada tahun 2024, sementara realisasi tahun 2025 belum tersedia. Capaian ini mengindikasikan perbaikan dalam manajemen kinerja dan akuntabilitas OPD. Ke depan, peningkatan kualitas indikator kinerja dan integrasi perencanaan-penganggaran akan terus diperkuat.

5. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum mulai ditetapkan pada Tahun 2023 dengan target >70–80, dan meningkat menjadi 87,05 pada Tahun 2025. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar 55,35, yang menunjukkan bahwa target belum tercapai. Namun, pada Tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan dengan realisasi 86,46, mendekati target Renstra. Pada Tahun 2025, realisasi tercatat sebesar 77,46, yang menunjukkan bahwa kinerja berada pada kategori baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Perbaikan signifikan ini didorong oleh peningkatan koordinasi dan pemenuhan indikator reformasi hukum, dan ke depan akan terus diperkuat melalui harmonisasi regulasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 telah diselaraskan dengan kebijakan dan standar nasional yang berlaku. Meskipun Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menjalankan fungsi pelayanan dasar secara langsung, pengukuran kinerjanya tetap dapat dibandingkan dengan standar nasional melalui beberapa indikator umum seperti berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Indikator		Realisasi		
Tanjung Jabung Timur	Nasional	Tanjung Jabung Timur	Nasional	Lembaga
Nilai LPPD	EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	-	-	Kemendagri
Rata Rata Nilai SAKIP OPD	-	-	-	-
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks Inklusi Keuangan Nasional	-	80,51%	OJK
NILAI SAKIP OPD	-	-	-	-
Indeks Reformasi Hukum	-	77,46	-	-

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Fisik		Anggaran		Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
				Target	Realisasi	Pagu	Realisasi		
Meningkatnya Akuntabilitas Daerah	1	Nilai LPPD							
	2	Rata Rata Nilai SAKIP OPD							
	3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)							
	4	NILAI SAKIP OPD							
	5	Indeks Reformasi Hukum							
	1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100,00%	100,00%	Rp5.342.800	Rp5.336.800	Target fisik tercapai 100 persen dan realisasi anggaran lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.	Optimalisasi pelaksanaan mediasi serta peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian sengketa tanah.
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00%	98,25%	Rp35.519.909.263	Rp33.410.165.795	Capaian fisik mencapai 98,25 persen dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari perencanaan.	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan prioritas serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.
	3	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100,00%	99,50%	Rp4.071.477.238	Rp3.941.321.771	Capaian fisik mencapai 99,50 persen dan pelaksanaan program berjalan efektif serta efisien.	Penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
	4	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang Jasa (Persentase)	100,00%	100,00%	Rp2.143.969.520	Rp2.052.503.903	Target fisik tercapai 100 persen dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu.	Optimalisasi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pengendalian program agar lebih tepat sasaran dan efisien.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

LKjIP memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran dengan perhitungan sebagai berikut:

$$E = (100) \frac{(\text{Realisasi Anggaran})}{(\text{Target Anggaran})} \times 100\%$$

Tabel 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Kesimpulan
				Terget	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Akuntabilitas Daerah	1	Nilai LPPD								
	2	Rata Rata Nilai SAKIP OPD								
	3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)								
	4	NILAI SAKIP OPD								
	5	Indeks Reformasi Hukum								
	1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Percentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Percentase)	100%	100,00%	100,00%	Rp5.342.800	Rp5.336.800	99,89%	Efisien
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	98,25%	98,25%	Rp35.519.909.263	Rp33.410.165.795	94,06%	Efisien
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Percentase)	100%	99,50%	99,50%	Rp4.071.477.238	Rp3.941.321.771	96,80%	Efisien
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang Jasa (Percentase)	100%	100,00%	100,00%	Rp2.143.969.520	Rp2.052.503.903	95,73%	Efisien

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Daerah , secara umum pelaksanaan program menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan.

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan mampu mencapai capaian kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar 99,89 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja dapat tercapai dengan penggunaan anggaran yang hampir optimal, sehingga pelaksanaan program dinilai efisien.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai capaian kinerja sebesar 98,25 persen dengan realisasi anggaran sebesar 94,06 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja berhasil direalisasikan dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah, sehingga penggunaan anggaran pada program ini dinilai efisien.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mencatat capaian kinerja sebesar 99,50 persen dengan realisasi anggaran sebesar 96,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, politik, hukum, dan kesejahteraan rakyat dapat berjalan secara efektif dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat, sehingga pelaksanaan program dinilai efisien.

Program Perekonomian dan Pembangunan berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar 95,73 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja dapat diwujudkan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari perencanaan, sehingga program ini juga dinilai efisien.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada seluruh program pendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Daerah lebih besar atau sebanding dengan capaian realisasi anggaran. Dengan demikian, penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini dapat dinilai efisien dan menunjukkan pengelolaan anggaran yang akuntabel serta berorientasi pada hasil.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis OPD	Indikator	Program/Kegiatan	Realisasi (%)		Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
			Keuangan	Fisik		
Meningkatnya Akuntabilitas Daerah	Nilai LPPD					
	Rata Rata Nilai SAKIP OPD					
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)					
	NILAI SAKIP OPD					
	Indeks Reformasi Hukum					
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	99,89%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD dan Indeks Reformasi Hukum	Program ini mendukung peningkatan akuntabilitas daerah melalui penyelesaian perdamaian melalui mediasi yang mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kepastian hukum. Capaian fisik 100% dan realisasi keuangan 99,89% menunjukkan program dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Nilai LPPD dan Indeks Reformasi Hukum.
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	99,89%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD dan Indeks Reformasi Hukum	Kegiatan ini berperan langsung dalam mendukung ketertiban administrasi dan penyelesaian permasalahan hukum di daerah. Tingginya pencapaian fisik dan keuangan menunjukkan optimalnya pelaksanaan kegiatan, yang berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi hukum daerah.

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	94,06%	98,25%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD dan Nilai SAKIP OPD	Program ini merupakan program utama penopang pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Capaian kinerja yang tinggi dengan serapan anggaran yang efisien menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung peningkatan Nilai LPPD dan SAKIP OPD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,69%	85,71%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD dan Nilai LPPD	Kegiatan ini memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Capaian kinerja yang tinggi menunjukkan penerapan siklus SAKIP yang berjalan baik, sehingga mendukung peningkatan nilai SAKIP OPD dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93,39%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD dan Nilai LPPD	Penyelenggaraan administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Capaian fisik 100% mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkontribusi pada peningkatan SAKIP OPD dan Nilai LPPD.
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80,88%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD	Pengelolaan barang milik daerah yang tertib mendukung akuntabilitas aset pemerintah. Meskipun serapan keuangan relatif lebih rendah, capaian fisik 100% menunjukkan kegiatan yang terlaksana sesuai target dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91,09%	99,54%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD dan Nilai LPPD	Kegiatan ini mendukung pengelolaan SDM aparatur yang tertib dan profesional. Tingginya pencapaian fisik dan keuangan menunjukkan efektivitas pelaksanaan administrasi kepegawaian dalam mendukung akuntabilitas kinerja OPD.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,18%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD	Administrasi umum yang berjalan optimal mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah. Capaian fisik 100% menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pencapaian kinerja OPD dan peningkatan nilai SAKIP.
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,24%	99,98%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD dan Nilai LPPD	Pelaksanaan pengadaan yang akuntabel dan transparan mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tingginya capaian kinerja menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas daerah.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,27%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD	Kegiatan ini memastikan kelancaran operasional perangkat daerah. Capaian fisik 100% menunjukkan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas OPD dan peningkatan kinerja organisasi.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,61%	93,75%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD	Pemeliharaan aset daerah mendukung ketidakberadaan pelayanan dan efektivitas kerja OPD. Capaian kinerja yang baik menunjukkan pengelolaan aset yang akuntabel.
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	92,76%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD	Kegiatan ini mendukung lancarnya tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi yang efektif dan efisien berkontribusi pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95,55%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD	Fasilitasi kerumahtanggaan mendukung operasional pemerintahan daerah secara menyeluruh. Capaian fisik 100% menunjukkan dukungan optimal terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
	Penataan Organisasi	97,56%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD dan Indeks Reformasi Hukum	Penataan organisasi mendukung efektivitas struktur kelembagaan dan reformasi birokrasi. Pelaksanaan kegiatan yang memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan akuntabilitas dan reformasi hukum daerah.
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	99,14%	100,00%	Nilai LPPD dan Indeks Reformasi Hukum	Kegiatan ini mendukung efektivitas koordinasi dan komunikasi pimpinan daerah dalam pemerintahan. Capaian kinerja yang tinggi menunjukkan dukungan yang optimal terhadap kinerja kepala daerah.
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	96,80%	99,50%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD dan Indeks Reformasi Hukum	Program ini mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kinerja capaian yang tinggi menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan reformasi hukum daerah.
	Administrasi Tata Pemerintahan	98,67%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD dan Indeks Reformasi Hukum	Administrasi tata pemerintahan yang baik mendukung kepastian hukum dan ketertiban regulasi. Penyelenggaraan kegiatan yang optimal memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	96,49%	98,50%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD	Kegiatan ini mendukung pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tingginya capaian kinerja menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	96,68%	100,00%	Menunjang pada indikator Indeks Reformasi Hukum	Kegiatan ini berperan langsung dalam mendukung reformasi hukum daerah melalui koordinasi dan fasilitasi kebijakan hukum. Kinerja capaian yang tinggi menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan indeks reformasi hukum.
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	95,73%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD dan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Program ini mendukung pengelolaan perekonomian dan pembangunan daerah secara akuntabel. Kinerja capaian yang tinggi menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan akses dan pengelolaan ekonomi daerah.
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	92,59%	100,00%	Menunjang pada indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	96,71%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD	Administrasi pembangunan yang cukup mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja yang tinggi menunjukkan pengelolaan pembangunan yang akuntabel.
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	97,19%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai SAKIP OPD dan Nilai LPPD	Pengelolaan pengadaan yang transparan dan akuntabel mendukung efisiensi dan efektivitas program pembangunan daerah serta peningkatan kinerja pemerintah daerah.
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	79,53%	100,00%	Menunjang pada indikator Nilai LPPD	Kegiatan ini mendukung pengawasan dan pengendalian kebijakan sumber daya alam. Meskipun capaian keuangan relatif lebih rendah, capaian fisik 100% menunjukkan kegiatan tetap terlaksana dan mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Secara finansial dana rutin yang tersedia maupun untuk membiayai kegiatan sehari-hari, pembayaran gaji, tunjangan, insentif dan lain-lain. Begitu pula dan pembangunan yang cukup memadai untuk melaksanakan program/kegiatan bagian. Untuk penyerapan dan realisasi anggaran tahun 2025 dari pagu dana sebesar **Rp. 41.740.698.821,-** terealisasi sebesar **Rp. 39.409.328.269,-** atau sekitar **(94%)** dan dana yang tidak terserap **Rp. 2.331.370.552,-**.

Keberhasilan terhadap capaian ini tidak terlepas dari upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perbaikan tersebut mencakup penyempurnaan mekanisme dan prosedur kerja, peningkatan kualitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penguatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara rutin, baik secara bulanan maupun triwulanan, guna memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, serta menyampaikan laporan kinerja dan penggunaan anggaran secara berkala kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara umum Realisasi Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program	2025		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Daerah	1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp5.342.800	Rp5.336.800	99,89%
	2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp35.519.909.263	Rp33.410.165.795	94,06%

	3	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp4.071.477.238	Rp3.941.321.771	96,80%
	4	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp2.143.969.520	Rp2.052.503.903	95,73%
	Total		Rp41.740.698.821	Rp39.409.328.269	97%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Daerah secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja dan realisasi anggaran program serta kegiatan yang mendukung indikator sasaran, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Nilai LPPD, didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan umum, administrasi pemerintahan, serta penataan organisasi dengan pencapaian kinerja fisik yang tinggi dan realisasi anggaran yang efisien.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD dan Rata-rata Nilai SAKIP OPD, yang didukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah, khususnya pada kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, serta administrasi keuangan dan kepegawaian perangkat daerah.
3. Meningkatnya Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang didukung oleh pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan, terutama pada kegiatan kebijakan perekonomian daerah, penyediaan barang dan jasa, serta administrasi pembangunan.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola hukum daerah yang diukur melalui Indeks Reformasi Hukum, didukung oleh program pemerintah dan kesejahteraan rakyat, khususnya pada kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum serta penyelesaian permasalahan hukum di daerah.

4.2 Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan kualitas pelaksanaan program serta kegiatan adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja , agar keselarasan antara kinerja perencanaan, penganggaran, dan capaian dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mendukung peningkatan Nilai SAKIP OPD dan Nilai LPPD.
2. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan , terutama pada kegiatan dengan pencapaian fisik tinggi namun realisasi keuangan relatif lebih rendah, melalui penyempurnaan perencanaan dan pengendalian anggaran.
3. Memperkuat sinergi antar program dan kegiatan, agar kontribusinya terhadap indikator sasaran strategi, seperti IKAD dan Indeks Reformasi Hukum, dapat lebih terukur dan berdampak langsung.
4. Meningkatkan kualitas pemantauan dan pelaporan kinerja, sehingga hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pengambilan pada periode berikutnya.

Muara Sabak, 21 Januari 2026

Sekretaris Daerah,

R. Sapril, S.I.P.

